

DEMILITERISASI DI INDONESIA
(STUDI ATAS KEBIJAKAN-KEBIJAKAN PADA MASA
PEMERINTAHAN ABDURRAHMAN WAHID)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

FATHUROHMAN

99373372

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DRS. AHMAD PATTIROY, M.A.
2. UDIYO BASUKI, S.H.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Fathurohman
Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Fathurohman
NIM : 99373372
Judul : Demiliterisasi di Indonesia (Studi Atas Kebijakan-Kebijakan
Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharapkan agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsani 1425 H
6 Agustus 2004 M

Pembimbing I



Drs. Ahmad Pattiroy, M.A
NIP: 150256 548.

Udiyo Basuki, S.H.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Fathurohman

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Fathurohman
NIM : 99373372
Judul : Demilitarisasi di Indonesia (Studi Atas Kebijakan-Kebijakan
Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid)

Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu pada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan
mengharapkan agar segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima
kasih.

Wasssalamu'alaikum wr.wb

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsani 1425 H
6 Agustus 2004 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H.
NIP: 150 291 022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Demiliterisasi Di Indonesia

(Studi Atas Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid)

yang disusun oleh:

Fathurohman

NIM: 99373372

Telah dimunaqasyah di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Agustus 2004 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 26 Februari 2005

Dekan Fakultas Syariah



Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A.

NIP: 150 182 698

PANITIA UJIAN

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Mahrus Munajat, M.Hum

NIP: 150 260 055

Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE, MSI

NIP: 150 253 260

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

NIP: 150 256 548

Udiyo Basuki, S.H.

NIP: 150 291 022

Penguji I

Penguji II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.

NIP: 150 256 548

H. Muhammad Nur, M.Ag

NIP: 150 282 522

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين, أشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, hanya kekuatan-Mu dan kasih sayang-Mu penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir studi dalam bentuk skripsi yang berjudul "Demiliterisasi di Indonesia (**Studi Atas Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid**). Teriring salawat dan salam semoga senantiasa melekat dalam keharibaan Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga Yauṁul ba'ast.

Penyusun menyadari betul bahwa penyelesaian tugas akhir ini sedikit banyaknya atas bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka sudah seharusnya penyusun menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H.Malik Madaniy M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Abdul Madjid, selaku pembimbing Akademik.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy M.A, selaku pembimbing I dan Bapak Udiyo Basuki. S.H selaku pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar memberi arahan dan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ayah tercinta Mohd Anwar dan Ibunda Sutiah, Mas Su'eb, Mas Kardi, Mba' Sutimah, Mba'yu Kusniatun & Tonginah beserta keluarga. Begitu juga dengan adik-adiku Rohmat, Rohamah dan dhe' Yati serta saudara-saudaraku yang telah memberikan spirit dengan tiada hentinya semenjak kuliah hingga akhir studi.

6. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Wahid Hasyim yang telah berjasa besar dalam proses pembelajaran dan pengalaman, khususnya Bapak K.H. Jalal Syuyuti beserta keluarga Ndalem.
7. Seluruh Ustadz/guru pondok yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun hingga sampai kepada ad-Dar-'ilm.
8. Rekan-rekan Senasip sepenanggungan khususnya di PP. Wahid Hasyim dan keluarga besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Kepulauan Natuna telah begitu lama kita berteman, bergurau, bercengkrama dalam setiap waktu dan saat untuk bertukar pikiran dan belajar bersama spt. Pak Khojir, Pak Parjo, Gus Jazim, Pak Basit, Pak Mughist, Bang Jalal. Zaenul, Khozin, M.Nur, Achlis, Rusman, Suyep, Faizah, Ita, Neni, Diah dan seluruh teman-teman yang telah berjasa kepada penyusun.

Penyusun hanya bisa berdo'a semoga Allah Yang Maha Kaya memberi balas jasa dan melimpahkan cinta kasih-Nya kepada mereka semua. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Jazākum Allah Ahsān al Jaza.

Yogyakarta, 19 Jumadil Tsani 1425 H
6 Agustus 2004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun


Fathurohman
NIM: 99373372

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987. Panduan transliterasi tersebut adalah:

A. Konsonan

No.	Arab	Nama	Latin	Nama
1.	ا	alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	-
3.	ت	ta'	t	-
4.	ث	sa'	s	s dengan titik di atas
5.	ج	jim	j	-
6.	ح	ha'	h	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-
8.	د	dal	d	-
9.	ذ	zal	z'	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	r	-
11.	ز	zai	z	-
12.	س	sin	s	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	g	-
20.	ف	fa'	f	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-
23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	هـ	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	apostrop
29.	ي	ya'	y	-

B. Vokal

Vokal Tunggal

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----	fathah	a	a
2.	-----	kasrah	i	i
3.	-----	dammah	u	u

Vokal Rangkap/Diftong

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	fathah dan ya'	ai	-
2.	وِ	fathah dan waw	au	-

Contoh:

مَوْضُوع : *maudū'* غير : *gairu*

Vokal Panjang (Maddah)

No.	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	اَ	fathah dan alif	a ⁻	a bergaris atas
2.	يَ	fathah dan alif layyinah	a ⁻	a bergaris atas
3.	يِ	kasrah dan ya'	i ⁻	i bergaris atas
4.	وِ	dammah dan waw	u ⁻	u bergaris atas

Contoh:

تُحِبُّونَ : *tuhibbūna* الْإِنْسَان : *al-insān*

C. Ta' al-Marbutah

Transliterasi Ta' Marbut {ah hidup dengan "t"

Transliterasi Ta' Marbut {ah mati dengan "h"

Jika Ta' Marbut {ah diikuti kata sandang *al/* dan lafal kedua dipisah maka ta' marbut {ah itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh:

الرَّحْمَةُ : *al-rahmah*

D. Huruf Ganda (*Syaddah* atau *Tasydid*)

Transliterasi *Syaddah* atau *Tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muḥammad*
الْوَدَّ : *al-wudd*

E. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “-”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

الْقُرْآن : *al-Qur’ān*
السُّنَّة : *al-Sunnah*

F. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital namun dalam transliterasi ini penulis menyamakannya dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang ‘al’, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Gazālī*
السبع المثاني : *al-Sab‘u al-Maṣānī*

G. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) atau apostrof jika berada di tengah lafaz atau di akhir. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh: إحياء علوم الدين : *Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn*

H. Penulisan Nama

Peraturan tentang penulisan nama tidak diterapkan secara ketat, seperti:

عبد الرحمن biasa ditulis *Abdurrahmān* atau *Abd al-Rahmān*.

ABSTRAK

Komitmen Abdurrahman Wahid membangun negara demokratis dan mewujudkan masyarakat madani/*civil society* tidak diragukan lagi. Begitu juga dengan obsesi untuk menjadikan Indonesia yang utuh, anti kekerasan dan menyantuni pluralisme. Hal ini sedikit banyaknya telah diimplementasikan pada masa pemerintahannya.

Keberhasilan pemerintahan Abdurrahman Wahid mengambil keputusan-keputusan sebagai upaya menuju supremasi sipil sebagai acuan dasar bagi hubungan sipil-militer di Indonesia. Minimalisasi peran militer di bidang politik dijabarkan dalam kebijakan pemisahan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Politik dan Keamanan serta penempatan orang sipil dalam posisi Menhan. Kemudian pemisahan secara tegas Polri dan TNI.

Kebijakan lainnya pun tidak kalah penting yaitu penghapusan Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional (Bakorstanas) dan Lembaga Penelitian Khusus (Litsus). Begitu juga dalam persoalan mutasi di tubuh militer, dicopotnya Wiranto dari Menkopolkam dan penempatan Laksamana Widodo AS (dari Angkatan Laut). Hal ini telah membuka wacana baru bahwa dari satuan manapun bisa dan berhak menempati posisi tersebut karena paradigma sebelumnya hanya dari satuan Angkatan Daratlah yang berhak dan tepat menempati jabatan tersebut.

Namun, sisi lain ketidakberhasilan pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa pemerintahannya yaitu: adanya penambahan Kodam baru di beberapa daerah. Penambahan Kodam ini direncanakan hingga tahun 2006, berjumlah 17 Kodam. Penambahan ini tentunya memperkuat kekuasaan struktural TNI sebagai indikasi bahwa TNI atau Militer masih setengah-setengah dan enggan melaksanakan apa yang disebut dengan Supremasi Sipil.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika pembahasan	19
BAB II: GAMBARAN UMUM	20
A. Sejarah Berdirinya Militer di Indonesia	20
B. Latar Belakang Munculnya Dwifungsi ABRI	24
1. Dwifungsi ABRI Tahun 1945-1959	24
2. Dwifungsi ABRI Tahun 1959-1966	33
3. Dwifungsi ABRI Tahun 1966-sekarang	38
BAB III: BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN DEMOKRASI SERTA KEBIJAKAN DEMILITERISASI DI INDONESIA	50
A. Biografi Abdurrahman Wahid	50
1. Latar Belakang Keluarga	50
2. Latar Belakang Pendidikan	54
3. Latar Belakang Sosial dan Politik	58
B. Pemikiran Abdurrahman Wahid Tentang Idealitas Demokrasi	60
C. Deskripsi Kebijakan Demiliterisasi di Indonesia	68

BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN DEMILITERISASI	
DI INDONESIA	76
A. Upaya Abdurrahman Wahid Membangun Civil Society	76
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Demiliterisasi di Indonesia	98
C. Format Hubungan Sipil dengan Militer	100
BAB V: PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran-Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
A. Lampiran I: Halaman Terjemahan	I
B. Lampiran II: Biografi Tokoh	V
C. Lampiran III: CURICULUM VITAE	VIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Selama 30 tahun ABRI berpolitik secara langsung dan 31 tahun terakhir berkuasa secara intensif, ternyata hasilnya adalah kegagalan secara mendasar meskipun di tahap awal itu membawa harapan bagi kemajuan bangsa. Kegagalan ini sebagai akibat dari otoritarianisme kehidupan politik yang ditegakkan atas dukungan ABRI.¹

Di balik kegagalan itu, pelaksanaan peran ganda militer telah membawa berbagai penderitaan bagi rakyat, terutama mereka yang menolak bekerja sama, pengkritik sistem mendapat "pengawasan" militer. Pengucilan politik, manipulasi kekuasaan, intrik politik, pembunuhan politik oleh militer. Tidak ada sedikitpun kekuatan di luar militer yang mampu mengoreksi aksi politik curang tersebut.²

Selama Orde Baru, ABRI (sekarang TNI-POLRI) dihipnotis untuk kepentingan *status quo*. Hal ini terlihat dari upaya penguasa Orde Baru, **Pertama**: dikeluarkannya produk-produk hukum seperti UU No. 16 Tahun 1969 yang mengatur tentang peran ABRI dalam MPR, DPR, dan DPRD. Dengan legitimasi hukum ini, ABRI dengan leluasa menguasai wilayah mana saja yang dikehendaki: di kursi DPR, MPR, DPRD, jabatan Gubernur, Bupati, Camat hingga dalam bidang olahraga pun tak luput dari genggamannya ABRI.

¹ Arbi Sanit, "Strategi Reformasi Dwifungsi ABRI", dalam Syarif Magalela, dkk (ed), *Berpolitik atau Kembali ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta, Bigraf, 1999), hlm.183.

² *Ibid.*, hlm. 184.

Ironisnya, jabatan yang terakhir ini ditempati tanpa adanya seleksi yang rasional, tapi yang terpenting ia berpangkat tinggi dalam militer/ABRI dan di mata penguasa tidak memiliki "cacat".

Kedua: ABRI dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan upaya politik penguasa agar mendukung Golkar telah terbukti pada masa itu Golkar memenangkan tujuh kali pemilu Orde Baru. Keeratan ABRI-Golkar ini, menyebabkan sering terdengar ucapan bahwa ABRI adalah kader Golkar. Andreas Pandiangan (1996) menggambarkan relasi ABRI-Golkar laksana "ibu" dengan "anak sulungnya" yang lebih diistimewakan dalam sebuah "rumah tangga" yang di dalamnya juga tinggal "anak-anak bangsa lainnya".³

Ketiga: Keberpihakan ABRI kepada penguasa. Hal ini terlihat dari pengusuran yang dilakukan oleh penguasa dan kroninya terhadap tanah dan pemukiman penduduk dengan ganti rugi yang tak manusiawi, dan tatkala mereka menuntut keadilan, maka yang pertama dihadapi adalah aparat keamanan. Mereka pun akhirnya tak berdaya, apalagi dibarengi dengan tuduhan "melawan pemerintah", PKI, atau dengan dalih bahwa semua itu "demi pembangunan", "demi kepentingan umum" seperti contoh : tragedi Nipah, Kedung Ombo, Kaca Piring dan sederet catatan hitam lainnya adalah kenyataan yang tak akan hilang dari memori rakyat.⁴

Dapatlah dipahami bahwa ABRI tidak lagi berdiri di atas semua golongan, yang berarti bukan lagi milik semua rakyat Indonesia melainkan

³ Lihat Arbi Sanit.....dalam Syarief Magalela (ed.), *Berpolitik atau Kembali ke Barak Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, hlm. viii-ix.

⁴ *Ibid.*

milik penguasa. ABRI telah menciptakan hubungan yang retak antara partai politik lain dengan Golkar, antara ABRI dan rakyat, antara pihak yang ekonomi-politiknya kuat dan yang lemah dan lebih dari itu, ABRI telah memundurkan sekaligus menghambat laju arus demokratisasi di Indonesia.

Jadi, dalam keadaan ini praktis tidak ada kontrol politik yang efektif terhadap pemerintahan Orde Baru. Ketidakefektifan kontrol ini terjadi baik dari lembaga formal, yaitu legislatif, maupun yang datang dari kelompok-kelompok oposisi. Pada saat yang sama, lembaga yudikatif pun praktis tidak memainkan peranan kontrol yang substansial, mengingat keterbatasan-keterbatasan struktural yang dimilikinya.

Maka sekarang ini, Dwifungsi ABRI diketengarai sebagai satu-satunya pemicu akar permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti di bidang politik, ekonomi dan hukum. Itulah sebabnya gelombang reformasi, rakyat menghendaki membumikan Dwifungsi ABRI/peran ganda kaum militer. Alasan dasar mengapa Dwifungsi ABRI perlu direformasi tidak lain karena ABRI telah keluar dari posisi, peran dan fungsinya sebagai alat negara yang berkewajiban menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok atau kekuatan politik tertentu. Dalam realitasnya ABRI justru menjadi instrumen politik dan berposisi sebagai lembaga yang hanya loyal pada penguasa. Karena itu ABRI seringkali terjebak pada penggunaan kekerasan hanya untuk mengamankan penguasa. Selain itu, posisi ABRI/Militer sebagai alat penguasa telah menjauhkan diri dari rakyat, bahkan

ABRI cenderung memusuhi rakyatnya sendiri. Hal ini bisa dibuktikan dari beberapa (pelanggaran HAM) yang sering dilakukannya⁵.

Jika keterlibatan ABRI dalam politik tidak segera dipangkas habis niscaya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkembang menuju sistem negara demokrasi sampai kapan pun juga proses demokratisasi hanya sekedar wacana tanpa realita. Belajar dari pengalaman negara-negara lain, dapat diasumsikan bahwa militerisme dan militerisasi akan menghambat demokrasi bahkan pembangunan itu sendiri. Tidak satu pun negara militeris dapat membangun sistem ekonomi maupun pembangunan secara stabil, sebab *resources* yang ada seperti anggaran negara tersedot untuk kepentingan tersebut.⁶ Sehingga upaya untuk menegakkan kontrol sipil atas militer di Indonesia pun tak jauh berbeda nasibnya dengan demokrasi.

Dari pemaparan masalah di atas penyusun mengeksplorasi sejauh mana implementasi demiliterisasi di Indonesia sebagai sistem terbaik membatasi Militer/TNI-POLRI dari pentas politik sebagai alternatif mengembalikan fungsi utamanya. Di sini penyusun akan memakai pisau analisis Fiqh Siyāsah dengan memilih judul **Demiliterisasi di Indonesia (Studi Atas Kebijakan-Kebijakan Pada Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid.)**

⁵ A. Malik Haramain, "Gus Dur dan Reposisi Militer" dalam Khamami Zada (ed), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, Cet.1 (Jakarta: Lakspedam, 2002), hlm: 69-70.

⁶ M. Riefqi muna, "Reformasi Sektor Keamanan, Demiliterisasi dan Demokratisasi", makalah disampaikan pada seminar dan peluncuran buku "*Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*", oleh IRE, di Gedung UC UGM Yogyakarta 12 juni 2002.

B. Pokok Masalah

Agar pembahasan dalam kajian ini mempunyai fokus yang jelas dan terarah, maka pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji mutlak diperlukan. Adapun masalah yang dapat dirumuskan adalah:

Bagaimanakah Demiliterisasi di Indonesia pada masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid?

C. Tujuan dan kegunaan

Adapun tujuan dilakukannya kajian ini adalah : Mengungkap Proses demiliterisasi di Indonesia pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid.

Sedangkan kegunaan dari kajian ini yang hendak dicapai penyusun mengharapkan :

1. Dapat memperkaya khasanah kepustakaan hukum Islam terutama dalam bidang Fiqh Siyasah
2. Hendaknya dapat menjadi studi komparatif atau studi lanjutan bagi pihak – pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan objek pembahasan ini.

D. Telaah Pustaka

Demiliterisasi adalah penarikan kembali pasukan dari daerah yang dikuasai hingga dikuasai oleh sipil atau pembebasan dari hak

militer/pendudukan militer.⁷ Dalam kajian ini, upaya penelusuran yang dilakukan terhadap beberapa literatur, tidak banyak yang didapatkan. Di antara skripsi yang hampir sama dengan pembahasan ini adalah Saeroni yang berjudul: "Wacana-wacana *"Civil Society"* dalam Pemikiran Islam Indonesia (studi atas pemikiran Abdurrahman Wahid).⁸ Namun kajian Saeroni masih dalam dataran teori tentang *civil society* Abdurrahman Wahid. Karena menurut beliau jalan menuju demokratisasi adalah menumbuhkan suburkan *Civil Society* bagi kalangan rakyat bawah. Jadi perbedaan mendasar dari skripsi penyusun adalah tidak lagi mengenai teoritis melainkan langsung dalam dataran praktis/ implementasi.

Selain itu skripsi yang disusun oleh Zaenul Arifin berjudul "*deskripsi demokrasi menurut K.H.Abdurrahman Wahid*".⁹ Dalam skripsinya, Zaenul Arifin lebih memfokuskan terhadap buah pikir tokoh bahwa demokrasi sebagai kondisi di mana kebebasan berpendapat benar-benar dijamin Undang-Undang, sebab kebebasan berpendapat merupakan salah satu esensi demokrasi. Karena bagi Abdurrahman Wahid nilai terpenting dari demokrasi selain syura/musyawarah juga terdapat di dalamnya kebebasan, dan keadilan. Adil dalam arti terbukanya peluang bagi semua orang dan berarti juga kemandirian untuk mengatur dirinya sendiri/adanya otonomi setiap individu yang bertanggung jawab.

⁷ Pius A. Partanto, M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm, 99.

⁸ Saeroni, "Wacana-wacana Civil Society dalam Pemikiran Islam (Studi atas pemikiran Abdurrahman Wahid), Skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2001).

⁹ Zaenul Arifin, "Deskripsi Demokrasi menurut K.H. Abdurrahman Wahid", Skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2004).

Literatur yang hampir sama kajiannya dengan penyusun adalah Khamami Zada dalam bukunya berjudul "*Neraca Gus Dur di Pangung Kekuasaan*",¹⁰ ia menyoroti semua kebijakan-kebijakan Gus Dur secara umum ketika menjadi Presiden. Sementara penyusun, di sini akan mengangkat tentang kebijakan-kebijakan Gus Dur pada masa pemerintahannya yang berkaitan dengan wacana-wacana demiliterisasi.

Demikian pula buku Mohammad Mahfud MD. berjudul "*Setahun Bersama Gus Dur*"¹¹ ia juga menyoroti kebijakan-kebijakan Gus Dur selama menduduki kursi kepresidenan, hanya saja Mohammad Mahfud MD menguraikan kandungan isi buku tersebut berdasarkan pada pengalaman pribadi beliau selama menjadi Menhan.

Sutoro Eko dalam makalah berjudul "*Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*", bahwa demiliterisasi, demokrasi dan desentralisasi adalah tiga pilar utama dari agenda reformasi yang harus selalu diperjuangkan. Namun dalam makalahnya itu, baru dalam dataran teoritis dengan menentukan strategi-strategi perguliran wacana di atas.¹²

Abdul Gaffar Karim, dkk, dalam Purwo Santoso, (ed), *Melucuti Serdadu Sipil: Mengembangkan Wacana Demiliterisasi dalam Komunitas Sipil*, memetakan militerisme ke dalam tiga wacana, yaitu pertama: wacana

¹⁰ Khamami Zada (ed), *Neraca Gus Dur di Pangung Kekuasaan*, Cet.1 (Jakarta: Lakspedam, 2002).

¹¹ Mohd.Mahfud MD, *Setahun Bersama Gus Dur : kenangan menjadi menteri di saat sulit*, Cet.1 (Jakarta: LP3ES, 2003).

¹² Sutoro Eko, "Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi", dalam seminar sehari dan peluncuran buku: *Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*, diselenggarakan oleh Sewindu IRE Yogyakarta di Gedung UC UGM Bulaksumur tanggal 12 Juni 2002.

pro militerisme, berisi argumen-argumen yang mengiyakan dan setuju dengan praktek-praktek militeristik. *Kedua*: Wacana kritis militerisme, dengan melihat kelemahan-kelemahan terhadap praktek dan pola militeristik. *Ketiga* Wacana anti militerisme, yang berisi argumen-argumen negatif terhadap makna militeristik bagi demokratisasi.¹³ Kajian ini tidak jauh berbeda dengan kajiannya Sutoro Eko, dimana ia mengomentari isu-isu militeristik yang berkembang dan praktiknya baik di perguruan tinggi maupun masyarakat.

Nurcholis Madjid dalam bukunya yang berjudul: *"Kerangka Dasar Masyarakat Madani" dalam Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*. Nurcholis Madjid memaknai masyarakat madani adalah bentuk masyarakat yang mengisyaratkan identitas "bersama". Masyarakat dengan hak dan kewajibannya sebagai bagian yang utuh, dimana hak-hak azasi masyarakat sebagai warga negara mendapatkan pengakuan oleh negara dan sebaliknya setiap warga negara juga dituntut untuk memenuhi kewajibannya kepada negara.¹⁴ Nurcholis Madjid menawarkan "jalan tengah" berupa masyarakat madani sebagai mediasi dari kebudayaan "Barat" dan "Islam".

¹³ Abdul Gaffar Karim, dkk, "Sengketa Wacana", dalam Purwo Santoso, (ed), *Melucuti Serdadu Sipil: Mengembangkan Wacana Demiliterisasi dalam Komunitas Sipil*, Cet,I, (Yogyakarta: Fisipol UGM Yogyakarta, 2000).

¹⁴ Nurcholis Madjid, ""Kerangka Dasar Masyarakat Madani" dalam, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press, Tt), hlm. 39.

E. Kerangka Teoritik

Asumsi dasar bahwa di negara manapun, bila militer terlibat dalam urusan politik secara institusi, maka selalu muncul permasalahan, karena militer adalah pengendali alat kekerasan: senjata, pesawat tempur, kapal perang, mobil tank dan sebagainya. Demokrasi akan runtuh bila militer berpolitik secara institusi, di Indonesia Dwifungsi mengajarkan bagaimana militer hanya dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan dan mengamankan kekayaan, sebagai contoh: kasus pembunuhan mahasiswa dan buruh yang berujung rasa oleh militer.¹⁵

Sejatinya perguliran wacana demiliterisasi banyak dipengaruhi oleh atmosfer demokratisasi, contohnya, di Indonesia indikator wacana ini dengan bergulirnya gelombang reformasi sehingga kian maraknya tuntutan transparansi dan demokratisasi di atas peran sosial politik Militer/TNI memaksa institusi ini kembali ke asal mulanya (*back to basic*).

Persepsi masyarakat mempersoalkan Dwifungsi ABRI secara *common sense* dapat dikemukakan beberapa faktor, *pertama*: perubahan yang terjadi dalam dinamika pola pikir masyarakat yang telah memunculkan semangat perubahan terhadap tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat, termasuk pembaruan kedudukan dan peran yang dijalankan ABRI dalam tata kehidupan ini.¹⁶ *Kedua*: Tidak tertutup kemungkinan mereka yang

¹⁵ M. Ghufri H. Kordi K, "Militer Profesional dan Demokrasi" dalam Syarif Magalela (ed.), *Berpolitik atau Kembali ke Barak Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Bigraf, 1999), hlm, 233-234.

¹⁶ Atantya H. Mulyanto, "Mengkaji Kembali dikotomi Peran Sosial Politik ABRI", dalam Syarif Magalela (ed.), *Berpolitik atau Kembali.....* hlm. 86.

mempersoalkan Dwifungsi ABRI ini terpengaruh oleh paham liberal yang memandang militer sebagai kekuatan profesional *an sich* (kekuatan pertahanan keamanan saja).¹⁷ Dan *ketiga*, dalam tubuh ABRI sendiri terjadi perubahan perkembangan, karena *performance* ABRI atau sebagian anggota ABRI yang terlalu bersemangat dalam menjalankan fungsi sosial-politiknya sehingga terkesan arogan, hendak menguasai.¹⁸

Jadi secara teoritis, berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan nasional akan meningkatkan kehendak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik sebagai aktualisasi atas eksistensi dirinya. Secara eksplisit, partisipasi tersebut akan diikuti oleh berkembangnya cara berpikir dan bersikap yang semakin kritis serta cara bertindak yang semakin rasional. Perubahan sosial politik yang terjadi sebagai hasil pembangunan nasional, selain menghasilkan pembaruan cara pandang masyarakat terhadap realitas kehidupan sosial politik yang mereka hadapi, pada gilirannya juga akan menetaskan kehendak untuk mempengaruhi tata kehidupan sosial politik itu sendiri.

Karena sebuah wacana tidak dapat lepas dari konteks di mana wacana itu muncul. Dengan kata lain, setiap wacana pada dasarnya memiliki pendasaran sosial atau memiliki kognisi sosial. Sebab wacana tidaklah netral dari beragam kepentingan dan kompleks ideologi. Layaknya bahasa bukanlah sekadar alat menyampaikan buah pikiran melainkan juga cara membentuk

¹⁷ *Ibid*, hlm. 86.

¹⁸ *Ibid*.

realitas. Ringkasnya, senantiasa harus ada relasi kuasa yang bisa ditemukan dalam setiap wacana. Dengan demikian, wacana militerisme sesungguhnya juga mencerminkan seberapa mendalam hegemoni nilai-nilai militeristik ada dalam negara/masyarakat. Dari sinilah, mengapa peran politik militer mampu bertahan dalam kurun waktu yang lama. Yang tak kalah pentingnya juga bisa dipahami bagaimana reproduksi militerisme sebagai dampak keterlibatan militer yang mengintervensi wilayah sosial dan politik¹⁹.

Dapat dibedakan wacana militerisme dalam tiga kategori utama, yakni; *pertama*: Wacana yang pro militerisme, adalah wacana yang berisi argumen-argumen yang mengiyakan, membela, membenarkan dan membiakkan simbol-simbol, praktik-praktik dan cara kerja yang militeristik. *Kedua*: Wacana kritis terhadap militerisme adalah wacana yang mulai melihat kelemahan-kelemahan atau ekspresi ketidakpuasan terhadap praktik dan pola militeristik yang berlaku. *Ketiga*: wacana anti militerisme adalah wacana yang berisi argumen-argumen yang memiliki kesadaran penuh terhadap makna negatif militerisme dan telah memahami secara substansial bahaya militerisme bagi demokrasi, sehingga melawan militerisme.²⁰

Nurcholis Madjid mengatakan Demokrasi, Masyarakat Madani, "Civil Society" dan Civility adalah sebagai satu kesatuan dalam rumusan masyarakat madani. Menurutnya, jika demokrasi -sebagai dipahami di negara maju- harus mempunyai "rumah", maka rumahnya adalah masyarakat madani (*Civil*

¹⁹ Abdul Gaffar Karim, dkk "Sengketa Wacana" dalam Purwo Santoso (ed), Melucuti Serdadu... hlm. 124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 125.

Society), sedangkan *civility* merupakan kualitas etik yang dimiliki oleh masyarakat,²¹ Nurcholis Madjid lebih lanjut mengatakan Nabi Muhammad telah memberi teladan kepada umat manusia dalam membangun masyarakat madani (masyarakat beradab) dengan mereformasi sosial-kultural masyarakat Yatsrib yang kering dari nilai-nilai etika dan tidak mengindahkan hak-hak azasi perseorangan dengan tatanan masyarakatnya yang kacau.²² Dapat dipahami Nabi Muhammad dalam kepemimpinannya itu menggunakan suatu sistem yang disebut demokrasi dalam Islam. Firman Allah.

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلوة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم
ينفقون²³

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ²⁴

برأءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين²⁵

Dari ketiga ayat tersebut dapat ditegaskan beberapa prinsip :

1. Kedaulatan adalah di tangan rakyat (*umat*)
2. Bentuk pemerintahan adalah berdasarkan Musyawarah (*Syūrā*)

²¹ Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press,tt), hlm, 15.

²² *Ibid.*, hlm, 16.

²³ Al-Syuraa (42) : 38

²⁴ Ali-Imran (3) : 159

²⁵ Bara'ah/Taubah (9) : 1

3. Kepala pemerintahan adalah Imam atau khalifah, yaitu pelaksana Syari'ah (ajaran Islam).
4. Kepala pemerintahan diangkat dan diberhentikan oleh rakyat (umat).²⁶

Imam Razi berkata saat menafsirkan ayat Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَاطِيعُوا أَوَّلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ²⁷

Perintah Allah swt untuk taat di sini bersifat pasti. Dan siapa yang diperintahkan untuk ditaati haruslah sosok yang *ma'sum*, sehingga perintah Allah itu tidak membawa pada perbuatan yang salah dan mengikuti kesalahan itu. Kemudian dia mengatakan bahwa sosok yang maksum itu tidak dapat dicerminkan seorang individu atau sebagian umat, namun merupakan bentuk kolektif umat itu, yang terwakilkan dalam diri ahli ijtihad.

Firman Allah Surat An-Nisa' (4): 59 dapat dijadikan dalil atas validitas Ijma' sebagai sumber hukum. Disimpulkan dari situ bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri* itu adalah *ahl al-halli wa al-'aqdi*, dari ulama' umat yang mampu berijtihad dan menyimpulkan hukum, jika mereka bersepakat dalam sesuatu.²⁸

Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-halli wa al-'aqdi* dengan *ulil Amri* yang disebut dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' : 59. Ia menafsirkan *Ulil Amri* atau *ahl al-halli wa al-'aqdi* sebagai kumpulan orang dari berbagai

²⁶ Khoiruddin Nasution, "Islam dan demokrasi", *Asy-Syir'ah*, vol. 36, NO. I (2002), hlm. 46-47.

²⁷ Surat An-Nisa' (4) : 59

²⁸ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik*, hlm. 308.

profesi dan keahlian yang ada dalam masyarakat.²⁹ *ahl al-halli wa al-'aqdi* lembaga yang paling dikenal sebagai pelaksana *syura*. *Syura* merupakan suatu prinsip tentang cara pengambilan keputusan secara eksplisit ditegaskan oleh Al-Qur'an surat Asy-Syura (42) : 38.

Sesuai dengan kedudukannya sebagai sekedar salah satu elemen demokrasi dan sesuai pula dengan kenyataan bahwa Islam menetapkan *syūrā* baru dalam bentuk prinsip umum yang penjabarannya diserahkan kepada umat pada setiap masa dan tempat, maka semata-mata *Syura* tidak dapat menjamin tegaknya kehidupan yang demokratis. *Syūrā* akan berhasil jika memang tersedia situasi dan kondisi yang kondusif, yakni ketika elemen-elemen demokrasi yang lain seperti kesetaraan, pertanggungjawaban, keadilan dan kebebasan benar-benar telah tegak dalam masyarakat. Tanpa tersedianya situasi dan kondisi semacam itu, mustahil untuk mengharapkan berlangsungnya *Syūrā* dengan demokratis.³⁰

Menurut Hasan al-Turabi : Sebagian orang mengartikulasikan demokrasi semuanya dan bukan didasarkan pada hakekat maknanya secara gramatikal-yakni pemerintahan oleh rakyat-bahkan juga bukan bagaimana demokrasi diartikan di barat. Sepanjang sejarah perjalanannya di barat, kata demokrasi dikaitkan erat dengan sekularisme dan hal itu tentu saja bertentangan dengan sifat gerakan Islam. Dengan politik yang *amoral*

²⁹ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet. III (Jakarta:Raja Grafindo Persada,1997). Hlm. 68.

³⁰ A. Malik Madany, "Syūrā sebagai elemen penting Demokrasi", *Asy-Syir'ah*, Vol. 36, NO. I (2002), hlm. 77-78.

demokrasi tentu saja menjadi sesuatu yang ditentang. Sama sekali jauh dari sifat-sifat agama.³¹

Tujuan demokrasi dalam Islam adalah menolak diktatorisme yang berkuasa, menolak kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang, yang pada saat sekarang lazim disebut *Tiran*. Karena maksud dari demokrasi ialah pemberdayaan rakyat untuk memilih para penguasa seperti mereka kehendaki, memperhitungkan perilaku mereka, menolak perintah mereka jika bertentangan dengan undang-undang negara, yang jika diistilahkan menurut Islam : Jika mereka kepada kedurhakaan. Mereka berhak mencopot para penguasa itu jika menyimpang, tidak mau menerima nasehat dan peringatan.³²

Islam adalah agama yang mengajak kepada keadilan, melawan penindasan, menolak eksploitasi dan manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik tidak bermoral. Substansi ditegakkannya nilai dan praktek demokrasi adalah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum. Dan ini secara nyata tercermin dan dipraktekkan oleh Nabi dan al-khulafa ar-Rasyidun pada masa awal Islam.³³

³¹ Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, terjemahan dari *Tajdid Al-Fikr Al-Islam* alih bahasa Abdul Haris dan Zaimul Am, cet. I (Bandung: Arasy, 2003), hlm. 175-176.

³² Yusuf Al-Qardawy, *Fiqh Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, terjemahan dari *Min Fiqhid Daulah Fil-Islam* alih bahasa Kathur Suhardi, cet. III (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm. 195.

³³ Umaruddin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 16.

Kebijakan Muhammad di atas sesuai dengan perintah menegakkan *al-Amr bi al-ma'ruf* dan *al-nahy 'an al-munkar*, dengan tujuan mengayomi kehidupan umat, melayani dan menjaga kemaslahatan bersama. firman Allah:

ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون.³⁴

Begitu juga Rasullulloh mengingatkan:

ان الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه او شك ان يعمهم الله بعقاب من عنده...³⁵

Dan dasar kaidah fiqhiyah berbunyi :

مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب³⁶

Karena kajian ini merupakan kajian *siyāṣah syar'īyah* sebagaimana tujuan *maqāṣid al-syar'īah* adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat luas. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāṣah syar'īyah* sebagai wewenang penguasa/pemimpin dalam mengatur kepentingan umum negara Islam sehingga terjamin kemaslahatan dan terhindar dari segala kemudharatan dalam batas-batas yang ditentukan *syara'* dan kaidah-kaidah

³⁴ Alī-'Imrān (3) : 104.

³⁵ Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam *Sunannya* dari hadith Abu Bakar. Imam Ahmad dan para ashabusunnah juga meriwayatkannya. Turmudzi mengatakan hadist ini adalah hasan Shahih. Dikutip dari Yusuf Qardhawi, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafriel Halim, Cet. I, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 191.

³⁶ Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd Al-'Aziz Ibn 'Abd al-Salam al-Salamī, *Qawā'id al-Ahkām fi Masā'il al-Anām*, (Mesir: al-Istiqāmah, t.t) I. hlm. 11

umum yang berlaku sekalipun upaya ini tidak sejalan dengan ijtihad ulama,³⁷ maka kemasiahatan merupakan tujuan utama dalam politik Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam kajian yang akan dibahas nanti, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), artinya penelitian yang diarahkan pada penelaahan dan pembahasan-pembahasan terhadap sumber-sumber kepustakaan, makalah yang ada relevansinya dengan masalah tersebut.

b. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan eksplanatoris, yaitu dengan mendiskripsikan sifat-sifat tokoh tersebut hingga ke akar-akarnya serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar tokoh.³⁸ Penelitian tipe ini adalah termasuk penelitian sejenis hukum dan sosial.

c. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara membaca,

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoven, 1996), V: 1926 "*Siyasah Syariyyah*".

³⁸ Husain Usman dan Purnomo Setiyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 81.

menelaah, memahami serta mempelajari referensi-referensi yang ada kaitannya dengan pembahasan baik data-data primer maupun skunder.

d. Analisa Data

Setelah data yang diperoleh terhimpun, maka data tersebut diidentifikasi dan dianalisis secara deduktif dan induktif. Deduktif adalah menggunakan data yang bersifat umum, kemudian diolah dan mengambil faktor khusus sehingga dapat diambil kesimpulan khusus. Sementara induktif adalah metode yang mempelajari cara-cara penalaran yang benar, berawal dari hal-hal yang khusus yang bersifat boleh jadi atau mungkin, juga fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa konkrit kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.³⁹

e. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan sosiologi. Normatif di sini adalah suatu usaha untuk menjelaskan pendapat-pendapat tokoh tersebut manakala menelaah dari sisi hukum Islam (fiqh), hal ini penting karena kajian ini merupakan satu bagian dalam kajian hukum Islam khususnya fiqh siyasah. Adapun pendekatan sosiologi dimaksudkan di sini adalah bahwa setiap produk pemikiran pada dasarnya merupakan hasil interaksi si pemikir dengan lingkungan sosio kultural dan sosio politik yang mengitarinya.

³⁹ Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 42.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi nanti lebih terarah dan memberikan gambaran yang jelas, penyusun membagi pembahasan ke dalam lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab dan anak sub bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan, terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Semua sub bab tersebut dimaksudkan sebagai gambaran awal dari bahasan yang akan dikaji oleh penyusun.

Bab kedua, memaparkan gambaran umum masalah yang mendiskripsikan tentang sejarah berdirinya militer dan munculnya militerisme pada masa pemerintahan Orde Baru.

Bab ketiga, mengulas biografi singkat Abdurrahman Wahid, yang meliputi latar belakang sosial politik dan ide demokrasi, setelah itu memaparkan aplikasi kebijakan-kebijakan strategis masa pemerintahannya sebagai upaya menumbuhkan *civil society*.

Bab keempat, menganalisis demiliterisasi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, meliputi faktor pendukung dan penghambat, format hubungan sipil-militer serta relevansinya dengan arus demokratisasi di Indonesia yang disertai dengan argumentasi secara kuat dan benar.

Bab kelima, merupakan bab penutup dimana penyusun mereduksi dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada pembahasan-pembahasan sebelumnya ada beberapa hal penting bagi penulis selama pemerintahan Abdurrahman Wahid seputar keterlibatan militer dalam politik. Ada beberapa catatan penting mengenai serangkaian perubahan militer dengan sipil. Sekiranya dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

Pertama, perubahan mendasar seputar visi TNI, kondisi ini menghantarkan TNI menyadari bahwa doktrin dwifungsi ABRI selama ini telah mengalami distorsi penafsiran yang cukup serius selama Orde Baru. TNI tidak lagi berusaha aktif dalam politik praktis dan bersikap netral terhadap partai-partai politik. Selain itupun dalam menyelesaikan persoalan negara, TNI tidak selalu di depan dan mendominasi.

Kedua, perubahan visi tersebut dibarengi dengan perubahan-perubahan pada tingkat yang lebih operasional. Perubahan ini ditunjukan oleh kebijakan penghapusan staf politik menjadi staf teritorial dan penghapusan penugaskaryaan TNI Sedangkan perubahan dari eksternal dimulai dari realisasi pemisahan Polri dari kelembagaan TNI dan memberdayakan Polri dalam mengatasi persoalan internal negara serta mengkonsentrasikan TNI dari tugas pertahanan negara (eksternal) kemudian melakukan pemisahan jabatan kementerian pertahanan (Menhan) dan jabatan kementerian politik dan keamanan (Menkopolkam) serta

penempatan orang sipil sebagai Menhan. Selain itu pun Pemerintahan melikuidasi Bakorstanas dan Litsus.

B. Saran-saran

Agar proses demiliterisasi di Indonesia dapat terwujud, maka perlu adanya upaya oleh segenap elemen masyarakat terutama sipil dan militer untuk berkiprah dalam politik negara haruslah:

1. Egalitarianis, dengan sikap ini nilai dan derajat kemanusiaan semuanya dipandang sama. Karena prinsip egalitarianisme merupakan faktor yang sangat penting dalam memerankan kemajuan kehidupan sosial politik suatu bangsa.
2. Pemberian penghargaan kepada seseorang berdasarkan prestasi, bukan prestise semisal, keturunan, kesukuan, ras dan lainnya. Maksudnya ialah yang terpenting adalah kemampuan/kredibiitas, bukan dilihat dari mana seseorang itu apakah militer ataupun tidak. Karena menafikkan prinsip ini berarti tidak memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak dari seluruh aktivitas sosial-politik. Sebagaimana sabda Rasulullah saw: "bila suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka nantikan saja kehancurannya".
3. Adanya keterbukaan untuk berpartisipasi bagi seluruh anggota, masyarakat. Karena dengan prinsip ini membuka peluang bagi masyarakat untuk ikut memikirkan bangsa dan negara dengan cara urun rembuk, menyalurkan

aspirasinya kepada pihak penguasa sebagai wakilnya untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju dan sejahtera.

4. Para anggota TNI sendiri harus benar-benar menghayati demokrasi sebagai "cara hidup" (*way of life*). Tanpa penghayatan seperti itu maka usaha menegakkan supremasi sipil akan menjadi palsu, seperti patung tanpa jiwa. Di mana-mana termasuk di negara Indonesia demokrasi terhalang oleh mereka yang mengaku "demokrat" namun tidak menunjukkan sikap pribadi yang tidak demokratis.

DAFTAR PUSTAKA.

A. Kelompok Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1989

B. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

Abi Muḥammad 'Izz al-Din 'Abd Al-'Azīz Ibn 'Abd al-Salām al-Salāmī, *Qawā'id al- Ahkām fi Maṣāliḥ al-Anām*, (Mesir: al-Istiḳāmah, t.t)

As-Salām, Izzuddin ibn Abi, *Qawā'id al-Ahkām fi Maṣāliḥ al-'Anām*, (Kairo: Al-Istiḳamat, t.t)

Masbukin, Imam, "Qawa'id al- Fiqhiyah", dalam Azis Musthoffa, (ed), Cet. I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)

Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Negara*, alih bahasa Syafriel Halim, Cet. I, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 191.

C. Kelompok Buku-buku Lain

Alfian M, M.Alfan, "Mengkritisi Paradigma Baru ABRI" dalam M. Dahrhun Syarief Magalela, dkk, (ed.), *Berpolitik atau Kembali Ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, Cet.I (Jogjakarta: Bigraf, 1999)

Arifin, Zaenul, "Deskripsi Demokrasi menurut K.H. Abdurrahman Wahid", Skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari'ah, 2004).

Barton, Greg, *Biografi Gus Dur*, Cet.II, (Yogyakarta, Lkis, 2003), hlm. 30.

Dahlan, Abdul Aziz, dkk, (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru, Van Hoven, 1996)

Djalil, Matori Abdul, "Format Politik ABRI di Masa Depan" dalam M. Dahrhun Syarief Magalela, dkk, (ed.), *Berpolitik atau Kembali Ke Barak: Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, Cet.I (Jogjakarta: Bigraf, 1999)

Eko, Sutoro, "Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi", dalam seminar sehari dan peluncuran buku: *Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*, diselenggarakan oleh Sewindu IRE Yogyakarta di Gedung UC UGM Bulaksumur tanggal 12 Juni 2002.

Falakh, M.Fajrul dkk; *Implikasi Reposisi TNI-Polri di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 2001)

- Ghafur, Abdul *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia; Studi atas Pemikiran Gus Dur*, (Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar, 2002)
- Haramain, A. Malik, "Gus Dur dan Reposisi Militer" dalam Khamami Zada (ed), *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasaan*, Cet.1 (Jakarta: Lakspedam, 2002)
- Hikam, Muhammad AS "Abdurrahman Wahid dan Pemberdayaan Politik Umat", dalam Arief Afandi, *Islam Demokrasi Atas Bawah: Polemik Strategi Umat Model Abdurrahman Wahid dan Amien Rais*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997)
- Ida, Laode dan Jauhari, A. Thantowi, *Gus Dur Diantara Keberhasilan dan Kenestapaan*, cet. I (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999).
- Irsyam, Mahrus, "Abdurrahman Wahid dan Perombakan Militer" dalam A. Malik Haramain, *Abdurrahman Wahid: Goro-goro Dalam Lakon Multi Kritis*, Cet. I (Jakarta: Bumi Selamat, 2001)
- Janoitz, Morris, *The Military Intervenes: Case Studies in Politecal Development*, (New York: Russel Sage, 1988)
- Karim, Abdul Gaffar, dkk "Sengketa Wacana", dalam Purwo Santoso (ed.) *Melucuti Serdadu Sipil: Mengembangkan Wacana Demiliterisme dalam Komunitas Sipil*, Cet. I. (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2000)
- Latar belakang keluarga," <http://GusDur.net>, akses 20 Agustus 2003.
- Latar belakang pendidikan," <http://GusDur.net>, akses 20 Agustus 2003.
- M. Echols, Jhon, *An English-Indonesiaan Dictionary*, Cet.1 (New York: Cornell University, 1975)
- Madjid, Nurcholis, ""Kerangka Dasar Masyarakat Madani" dalam, Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid terhadap Pendidikan Islam Tradisional, (Jakarta: Ciputat Press, tt)
- Magalela, Syarief (ed.), *Berpolitik Atau Kembali Kebarak Militer Dalam Wacana Masyarakat Madani*, (Yogyakarta: Bigraf, 1999)
- Mahmud MD, Mohd., *Setahun Bersama Gus Dur: Kenangan Menjadi Menteri di Saat Sulit*, cet.I, (Jakarta: LP3ES, 2003)
- Masdar, Umaruddin, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999).

- Mas'udi, Masdar F., "Islam dan Demokrasi di Indonesia", dalam *Taswirul Afkar*, Edisi no.3 Tahun 1998
- Muna, M. Riefqi, "Reformasi Sektor Keamanan, Demilitearisasi dan Demokrasi" makalah disampaikan pada seminar tentang *Demiliterisasi, Demokratisasi, dan Desentralisasi*, penyelenggara *Institute for Research and Empowerment (IRE)*, diselenggarakan di UC UGM tanggal 12 juni 2002
- Nasution, Khoiruddin, "Islam dan Demokrasi", *Asy-Syir'ah*, Vol.36,NO.I.
- Partanto, Pius A. dan Al Barry, M Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)
- Rais,M.Dhiauddin, Teori Politik Islam, terjemahan dari *An-Nazhariyatu As-siyasatul-Islamiyah* alih bahasa Abdul Hayyie Al- Kattani, cet. I,(Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Rosyada, Dede, dkk" Pilar Penegak Masyarakat Madani" dalam Abdul Razak, dkk (ed), pendidikan kewargaan (Civil Education): *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, edisi revisi (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003)
- Saeroni,"Wacana-wacana Civil Society dalam Pemikiran Islam (Studi atas pemikiran Abdurrahman Wahid), Skripsi tidak diterbitkan (Jogjakarta: IAIN Fakultas Syari'ah ,2001)
- Sujito, Arie, "Demiliterisme dan Radikalisasi Sipil" makalah disampaikan pada seminar dan peluncuran buku "*Demiliterisasi, Demokrasi dan Desentralisasi*", oleh IRE, di Gedung UC UGM, Yogyakarta 12 juni 2002.
- Sulistiyo, Hermawan," Abdurrahman Wahid, Bakorstanas dan Litsus; Abdurrahman Wahid Menciptakan Supremasi Sipil", dalam A. Malik Haramain, *Abdurrahman Wahid: Goro-Goro dalam Lakon Multi Kritis*, Cet. I (Jakarta: Bumi Selamat, 2001)
- Thoha, Zainal Arifin, *Jagadnya Gus Dur: Demokrasi, Kemanusiaan dan Pribumisasi Islam*.Cet. I (Yogyakarta: Kutub, 2003)
- Usman, Husain dan Akbar, Purnomo Setiyadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, cet. III., (Jakarta: Bumi Aksara, 2002)
- Wahid, Abdurrahman, "Tanah Air dan Kedaulatan Rakyat" dalam Dian / Interfidei, *Identitas dan Kedaulatan 77 Tahun Gedong Baggoes Oke*, (Yogyakarta: Dian. 1998)

- Wahid, Abdurrahman, "Esai Khusus Abdurrahman Wahid Masih Perlukah Formalisme Agama?," <http://GusDur.net>, akses 19 September 2003.
- Wahid, Abdurrahman, " Sekali lagi Tentang Forum Demokrasi, dalam Kacung Marijan, *Abdurrahman Wahid mengurai*
- Wahid, Abdurrahman, "Tanah Air dan kedaulatan Rakyat", dalam Dian/Interfidei, *Identitas dan Kedaulatan*, 77 tahun Gedoeng Baggoes Oke (yogyakarta: Dian, 1998)
- Wahid, Abdurrahman, "Islam dan Civil Society, *Halaqah*, edisi No. 6/1998
- Wahid, Abdurrahman, "Demokrasi dalam Pengertian Kita," <http://GusDur.net>, akses 19 September 2003
- Wahid, Abdurrahman, " Agama dan Demokrasi," <http://GusDur.net>, akses 19 September 2003.
- Wiranto, "Paradigma Baru ABR", Kompas, 9 Maet 1999
- Yasmadi, *Modernisasi Pesantren: Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam Tradisional*, (Jakarta: Ciputat Press,tt)
- Zada, Khamami, *Neraca Gus Dur di Panggung Kekuasan*, Cet.1 (Yogyakarta: Lakspedam, 2002)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN TEKS ARAB DAN TEKS INGGRIS

NO	FN	HLM	TERJEMAHAN
BAB I			
1	23	12	Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.
2	24	12	Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini.
3	25	12	(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya yang dihadapkan kepada orang-orang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian dengan mereka.
4	27	13	Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu sekalian kepada Allah, Rasul, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kamu sekalian.
5	34	16	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
6	35	16	Bila masyarakat melihat perbuatan zalim, lalu mereka tidak mencegahnya, maka Allah akan memberikan hukuman secara umum
7	36	16	Menyempurnakan sesuatu adalah wajib maka mengusahakannya juga wajib
BAB II			
1	24	32	Tujuan Nasional dengan menyampaikan pidato jalan tengah pada waktu itu adalah memperjelas posisi tentara dalam negosiasi yang tengah berlangsung di Dewan Nasional. Isu yang tengah diperdebatkan adalah tentang status tentara sebagai golongan fungsional yang akan memperbolehkan para perwira secara sah untuk berperan dalam pemerintahan dengan atau tanpa keadaan darurat.

BAB IV			
1	3	77	Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang salah.
2	4	77	Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami kami lemparkan mereka ke laut. Maka lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.
3	17	83	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
4	38	95	Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penantang (orang-orang yang bearkhianat)
5	39	95	Suatu bangsa tidak akan disucikan bila tidak menerapkan keadilan; kaum lemah di kalangan mereka tidak mampu mendapatkan haknya dari kaum yang mampu tanpa goncangan.
6	60	104	Hai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
7	62	105	Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
8	63	105	Kebijaksanaan imam (pemimpin) terhadap rakyatnya itu harus disesuaikan dengan kemaslahatan.
9	65	106	Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Menegenal.
10	66	106	Dan orang-orang yang beriman dan anak-anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak

			cucu mereka dengan mereka dan kami tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang ia kerjakan.
11	67	107	Manusia itu adalah umat yang satu, (setelah timbul perselisihan) maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan dan Allah menurunkan bersama kitab dengan benar, untuk memberi keputusan di antara mereka yang diperselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu orang telah didatangkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antar mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang yang mereka selisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus.
12	68	107	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kabajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
13	69	107	Dan bagi orang-orang yang menerima seruan Tuhan-Nya dan mendirikan shalat sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka.
14	70	108	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rosul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Jika kemudian kamu berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rosulnya (sunnahnya).Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
15	71	108	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
16	72	108	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling

			kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
--	--	--	--



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

- 1) Muhammad Abduh (1849-1905) adalah ulama' pembaharu Mesir yang dianggap sebagai arsitek modernis Islam. Tahun kelahiran Muhammad Anduh bertepatan dengan kematian Muhammad 'Ali petualang Al-bania pembangunan Mesir modern. Rezim 'Ali dalam konteks politik ,menciptakan isu-isu perubahan modern secara intelektual berkaitan dengan keperintisan Abduh sebagai jurnalis, teolog, ahli hukum dan dalam kurun waktu enam tahun terakhir kehidupannya sebagai *Mufti* besar Mesir. Karir awalnya berdasarkan sufisme tarekat Syadziliyah, praktik dzikir, dan ta'widz. Studi studi universitasnya mengukuhkan tidak hanya sebagai seorang 'alim yang disegani, tetapi juga menyandarkan dia dari belenggu *Taqlid* (keterkaitan pada tradisi) yang kemudian menjadi sumber energi pembaharuannya. Meskipun secara intelektual meninggalkan latar belakang sufinya, dia tetap menanamkan kualitas kesalehan pada kehidupan akademisnya untuk pembebasan dari dampak *Taqlid* yang rusak.
- 2) Hasan al-Turabi lahir di Kassala, Sudan Timur pada 1932, dari keluarga yang memiliki tradisi panjang dalam pengajaran Islam Sufisme. Sebagai sosok pemikir, Ulama, Intelektual sekaligus sebagai politikus terkemuka di negeri Sudan. Dia merupakan pembaharu utama Republik Islam Sudan. Karier politiknya dimulai sejak ia memimpin *Al-Ikhwan Al Muslimun* Sudan (1964) dan menjabat sekretaris jenderal *Islamic Carter Front*. Pada 1969, setelah berlangsungnya upaya kudeta oleh kaum kiri terhadap rezim Numeiri, untuk pertama kalinya dia mendekam di penjara Sudan hingga 1977. Akibat perunahamn kebijakan Numeiri, Turabi diangkat menjadi Jaksa Agung dari tahun 1979 hingga 1982 dan menjadi kepala penasihat masalah-masalah diluar negeri hingga Maret 1985. Pada 1988 Front Nasional Islam (NIF) yang dipimpinnya berkoalisi dengan pemerintahan Sadiq *Al- Mahdi* dan mengantarkannya menjadi Deputy Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Sejak pemilu 1996, dia menjabat sebagai ketua parlemen. Pada Februari 2001, dia ditahan atas tuduhan (yang kurang bukti) berkhianat kepada negara.
- 3) Abdurrahman Wahid adalah seorang pemikir, penulis dan politisi Islam Indonesia. Dia merupakan salah satu pemimpin intelektual muslim yang paling berpengaruh di Indonesia dewasa ini. Dia juga merupakan seorang kolumnis terkenal masalah budaya, sosial dan politik yang mendorong kontribusi Islam pada pluralisme, keadilan sosial dan demokrasi. Dia addalah mantan presiden Republik Indonesia (20 Oktober 1999 hingga 22 Juli 2001) dan mantan ketua Umum Tanfidziyah NU (Nahdatul Ulama').

Sebuah organisasi Ulama' tradisional dengan puluhan juta pendukung, sebagian besar adalah penduduk pedesaan.

- 4) Nurcholish Madjid adalah seorang cendekiawan Indonesia dan pendukung toleransi agama. Di lahirkan di Jawa Timur, Nurcholish merupakan keturunan salah satu keluarga cendekiawan Islam yang paling di hormati di Indonesia. Dia di didik di pondok pesantren dan di Sekolah Modern Gontor. Beliau menerima gelar kesarjanaan dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) di Jakarta pada 1968. Dari 1966 hingga 1971 menjabat sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Beliau belajar di bawah bimbingan fazlur Rahman di Universitas Chicago dan menerima gelar doktor pada 1984 dengan disertasi mengenai pemahaman Ibn taimiyah tentang hubungan akal dengan wahyu. Pada awal 1990-an, Nurcholish memegang jabatan Institut Agama Islam Negeri Di Jakarta dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- 5) Muhammad Mahfud MD dilahirkan di Omben, Sampang (Madura), Jawa Timur. Pendidikan dimulai dari surau dan Madrasah Diniyyah. Ketika usia 7 tahun masuk Sekolah Dasar Negeri (pagi) sambil merangkap belajar di Madrasah Ibtidaiyyah (sore). Setamat SD melanjutkan ke Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan. Setelah lulus dari PGA 4 tahun ia melanjutkan ke Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) sebuah sekolah kejuruan unggulan milik departemen agama di Yogyakarta. Kemudian melanjutkan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) sekaligus kuliah di Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Gadjah Mada (UGM) jurusan Sastra Arab. Beliau aktif diberbagai organisasi seperti Ketua Umum Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Islam Swasta (BKSPTIS) se Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (1996-1998), Wakil Ketua Dewan Pembina Pengurus Pusat BKS-PTIS. Ketua Pimpinan Pusat Asosiasi Dosen Hukum Tata Negara se-Indonesia (1999). Karya-karyanya tersebar di berbagai jurnal dan media massa seperti; Prisma, Seni, Al-Jamiah, Kompas, Republika, Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Suara Merdeka, Kedaulatan Rakyat, serta lebih dari 125 makalah untuk berbagai penjamuan ilmiah. Buku-buku yang pernah di tulis adalah: Demokrasi dan Konstitusi (Rineka Cipta, 2001), Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Renika Cipta, 2000), Pergulatan politik dan hukum (Gama Media, 1999), Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Politik Hukum di Indonesia, Hukum Kepegawaian Negara. Dan beberapa buku lainnya.
- 6) A. Malik Haramain, lahir di Probolinggo tahun 1972. Alumnus Universitas Merdeka (UNMER) Malang tahun 1997. Sekarang sedang menyelesaikan S-2 di pascasarjana Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesai (UI). Menjadi koordinator kajian Pusat Studi dan Pengembangan Kebudayaan (Puspek) Averroes. Buku yang pernah ditulis: Mengawal Transisi, Refleksi atas Pemantauan Pemilihan Umum 1999, Jakarta : UNDP-

JAMPPI, 1999; PMII Di Simpang Jalan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999; koordinator pada buku Pemikiran-Pemikiran Revolusioner, yogyakarta: Puspek Averroes-Pustaka Pelajar, 2001. Aktif di bebrapa media antara lain KOMPAS, Suara Pembaharuan, Jawa Pos Berita Buana dan Sinar Harapan.

- 7) M.Dahrhun Syarief Magalela, dilahirkan pada 5 Juni 1976 di Desa Tawa, Kec. Gane Barat, Maluku Utara. Pendidikan yang ditempuh: Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairaat (1988) dan SD Negeri Tawa, MTs Al-Khairaat (1993) dan Madrasah Aliyah Al-Khairaat (1996) di Ternate. Beliau pernah menjadi santri di Pondok Pesantren Bumi Hijrah Ome Tidore. Alumnus Fakultas Sastra Universitas'45 Ujung Pandang. Sekretaris Umum Forum Komunikasi Pelajar Mahasiswa (FKPM-Waigitang) Ujung Pandang. Direktur Administrasi dan Keuangan Institut Studi Pembangunan Masyarakat (ISPM) dan Staf di Pusat Studi Penelitian Pengembangan Agama dan Masyarakat (P3am) Ujung Pandang.
- 8) Hermawan Sulisty, adalah Peneliti Puslitbang Politik Kewilayahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), anggota tim penulis buku Bila ABRI Berbisnis (1998), Menata Negara Usulan LIPI Tentang Rancangan RUU Politik (1998) dan produktif menulis di berbagai media massa.
- 9) Muhammad Wahyuni Nafis, Lahir di Tangerang Jawa Barat 18 Februari 1967. Alumnus Pesantren Dar El-Qalam, Gintung, Tangerang. Menyelesaik SI pada fakultas Ushuludin Jurusan Aqidah Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1993). Buku yang pernah disunting: Islam Agama Kemanusiaan, kumpulan tulisan Dr. Nurcholish Majdid (1995), kontekstualisasi Ajaran Islam, 70 Tahun Prof.Dr. Munawir Sjadzali, MA (1995). Dan buku yang pernah dinulisnya Agama Masa Depan: Perspektif Filsafat Perennial (1995). Menulis artikel di berbagai media massa. Kini Staf Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Fathurohman

Tempat /Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Mei 1979

Alamat Asal : Rt.07 Rk.04 Jl. Sagusari
Desa Harapan Jaya SP I
Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna
Prop.Kepulauan Riau Kode Pos 29183

Alamat Yogyakarta : PP.Wahid Hasyim Gaten Condongcatur Depok
Sleman Yogyakarta Kode Pos 55283

Orang Tua

Ayah : Mohammad Anwar

Ibu : Sutiyah

Alamat : Rt.07 Rk.04 Jl. Sagusari
Desa Harapan Jaya SP I
Kec. Bunguran Timur
Kab. Natuna
Prop.Kepulauan Riau Kode Pos 29183

Pendidikan Formal : SDN Raharjapura : 1987-1993
SLTP N 2 Raharjapura : 1993-1996
MAN I Ranai : 1996-1999

Pendidikan Non Formal : PP. Wahid Hasyim Yogyakarta